



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Jalan Ahmad Yani Nomor 30 Slawi *Phone* (0283) 6198525

Email: bp2dtegakab@gmail.com Kode Pos 52412



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas Akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Slawi, 31 Desember 2020

KEPALA BAPPENDA

Drs. EKO JATI SUNTORO.Si, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19640722 198503 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	v
A. Laporan Realisasi Anggaran	v
B. Neraca.....	vi
C. Laporan Operasional.....	vi
D. Laporan Perubahan Ekuitas	vi
E. Catatan atas Laporan Keuangan.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan.....	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.....	3
1.3 Sistematika penulisan atas laporan keuangan.....	4
BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAPPENDA.....	7
2.1 Ekonomi Makro.....	7
2.2 Kebijakan keuangan Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD BAPPENDA.....	8
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	8
2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja.....	10
BAB. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BAPPENDA.....	12
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.....	12
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	13



BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan.....	14
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan BAPPENDA.....	14
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan BAPPENDA.....	15
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan	22
BAB. V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAPPENDA.....	23
5.1 Rincian dan penjelasan atas pos laporan realisasi anggaran (LRA)	23
5.2 Rincian dan penjelasan atas pos-pos Neraca.....	30
5.3 Rincian dan penjelasan atas Pos Pendapatan-LO.....	42
5.4 Rincian dan Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
BAB. VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	48
A. Gambaran Umum Organisasi	48
B. Susunan Organisasi	49
BAB. VII PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 31 Desember 2020

KEPALA BAPPENDA

Drs. Eko Jati Suntoro, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640722 198503 1 006



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuanga ini meliputi:

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah selama periode 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp125.712.144.290,00 atau mencapai 100,39% dari alokasi anggaran Rp 125.228.000.000,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.615.437.775,00 atau 81,89% dari anggarannya sebesar Rp16.627.462.000,00

B. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp33.597.147.189,73 yang terdiri dari Aset Lancar (netto) sebesar Rp29.987.334.928,77 dan Aset Tetap Rp 3.619.525.516,96 serta aset lainnya sebesar Rp9.000.000,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.356.329.390,00 dan Rp32.259.531.055,73



C. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, Beban surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp132.171.994.271,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.030.347.140,17 sehingga terdapat surplus kegiatan operasional sebesar Rp116.148.636.864,83

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada 02 Januari 2020 adalah Rp28.394.441.692,54 surplus/defisit-LO sebesar Rp116.148.636.864,83 terdiri dari Koreksi Piutang sebesar Rp3.100.005.623,00, Koreksi Penyisihan Piutang sebesar (Rp3.293.026.327,64) dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2,00 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp32.259.531.055,73

E. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang Wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis Akrual.

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Bappenda

a. Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan Bappenda disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bappenda selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Bappenda terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Bappenda dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Bappenda mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Bappenda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen



Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bappenda dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Bappenda untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Bappenda dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Bappenda pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

- 1) Pelaporan keuangan Bappenda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Bappenda serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Bappenda mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Bappenda berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.



f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Bappenda, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Bappenda menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Bappenda Kabupaten Tegal.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Pelaporan keuangan Bappenda diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
- j) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;



- k) Permendagri No 59 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
- n) Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018;
- o) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemda;
- p) Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- q) Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- r) Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
- s) Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019.

1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Bappenda.
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Bappenda

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD BAPPENDA.

- 2.1 Ekonomi Makro



2.2 Kebijakan keuangan Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BAPPENDA

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappenda

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan Keuangan Daerah Bappenda.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Bappenda.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Bappenda.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Bappenda.

BAB. V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAPPENDA.

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Bappenda Kabupaten Tegal.

5.1.1 Pendapatan LRA

5.1.2 Belanja

5.2 Rincian dan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

5.3 Rincian dan Penjelasan atas Pos Pendapatan LO

5.3.1 Pendapatan-LO

5.3.2 Beban

BAB. VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BAPPENDA.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB. VII PENUTUP.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

2.1 Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, mempunyai tugas pokok :

“melaksanakan penunjang urusan penunjang pengelolaan pendapatan daerah”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bappenda selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD Bappenda untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) Entitas pelaporan keuangan;
- c) Dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) Asumsi dasar;
- e) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) Kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) Jenis laporan keuangan;
- i) Definisi unsur laporan keuangan;
- j) Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) Pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

- a) Target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal adalah :
 1. Mendukung pencapaian target kinerja program daerah dalam peningkatan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran;
 3. Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;



4. Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bagi pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Terlaksananya kegiatan peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
7. Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
8. Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

b) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2020. Dari total anggaran Belanja Langsung Daerah yang disediakan sebesar **Rp7.053.586.000,-** untuk mendanai pelaksanaan 4 (empat) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, terealisasi **Rp6.019.127.787,-** seperti terlihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1

Alokasi Belanja Langsung Daerah per Program Tahun Anggaran 2020

No	Program	Jmlh Kegt	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	7	3.480.246.000	2.653.760.547
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan	2	500.890.000	410.576.650
3	Program Pajak PBB dan BPHTB	2	2.353.200.000	2.262.100.350
4	Program Pajak Non PBB dan BPHTB	2	719.250.000	692.690.240
	Jumlah	13	7.053.586.000	6.019.127.787

Sedangkan anggaran Belanja Tidak Langsung untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp9.573.876.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp7.600.929.030,-** Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi untuk pos belanja tidak langsung :



No	Uraian	Anggaran (Rp) 2020	Realisasi (Rp) 2020
1.	Gaji dan Tunjangan	3.312.476.000	3.101.639.161
2.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	6.261.400.000	4.499.289.869
	Jumlah	9.573.876.000	7.600.929.030

2.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

1) Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

- ❖ Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
- ❖ Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
- ❖ Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja;
- ❖ Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);
- ❖ Keterbatasan SDM Penilai, Pemeriksa Pajak dalam pendataan dan informasi wajib pajak ;
- ❖ Masih banyaknya mutasi/perubahan obyek pajak bumi dan bangunan atau ketidaktahuan pemilik lahan kosong, obyek dalam sengketa yang tidak dilaporkan sesegera mungkin ;
- ❖ Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan ;
- ❖ Data piutang pajak yang masih belum jelas keberadaannya.

2) Faktor Pendukung

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:



- ❖ Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
- ❖ Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
- ❖ Tersedia media baik bagi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Perangkat Daerah;
- ❖ Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.
- ❖ Peningkatan sosialisasi, publikasi dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah ;
- ❖ Pembenahan system administrasi perpajakan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel dengan membuat jaringan online pembayaran pajak yang luas hingga ke desa-desa terpencil ;
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan bintek, pelatihan, asistensi dan penyuluhan secara kontinyu dan berkesinambungan;
- ❖ Peningkatan Monev untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak ;
- ❖ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

**BAB. III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TEGAL****3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bappenda Kab.Tegal**

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, untuk realisasi Pendapatan sebesar 108,38% dan Belanja sebesar 81,39% dengan perincian sebagai berikut :

a) Pendapatan

Jumlah Anggaran Tahun 2020 = 125.228.000.000,-
Dana yang terealisasi sebesar = 125.712.144.290,-

b) Belanja

Jumlah Anggaran Tahun 2020 = 16.627.462.000,-
Dana yang terealisasi sebesar = 13.615.437.775,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran	REALISASI	% Keu	% Fisik
1	2	3		4	5
	BELANJA	16.627.462.000	13.615.437.775	81,89	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.573.876.000	7.600.929.030	79,39	
	Belanja Pegawai	9.573.876.000	7.600.929.030	79,39	
	Belanja Langsung	7.053.586.000	6.014.508.745	85,27	
	Jumlah Anggaran	7.053.586.000	6.014.508.745	85,27	85,27
	Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	3.480.246.000	2.663.264.505		
1	Penyediaan Jasa Kantor	653.867.000	603.614.479	92,31	92,31
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	476.500.000	461.082.091	96,76	96,76
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.056.313.000	1.326.992.958	64,53	64,53
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.896.000	1.896.000	100,00	100,00
5	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	60.788.000	53.117.300	87,38	87,38

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran	REALISASI	% Keu	% Fisik
6	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	126.532.000	125.838.000	99,45	99,45
7	Rapat koordinasi dan Konsultasi	104.350.000	90.723.677	86,94	86,94
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operasional Pendapatan	500.890.000	428.515.150		
8	Perencanaan dan Penggalian Potensi Pendapatan	325.000.000	263.508.250	81,08	81,08
9	Pengendalian Operasional Pendapatan	175.890.000	165.006.900	93,81	93,81
	Program Pajak PBB dan BPHTB	2.353.200.000	2.230.262.850		
10	Pendapatan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang I (Pajak PBB dan BPHTB)	1.053.200.000	983.629.300	93,39	93,39
11	Penagihan Keberatan dan Piutang Bidang I (Pajak PBB dan BPHTB)	1.300.000.000	1.246.633.550	95,89	95,89
	Program Pajak Non PBB dan BPHTB	719.250.000	692.466.240		
12	Pendapatan, Penetapan dan Penyuluhan Bidang II (Pajak Non PBB dan BPHTB)	473.500.000	463.312.800	97,85	97,85
13	Penagihan, Keberatan dan Piutang Bidang II (Pajak PBB dan BPHTB)	245.750.000	229.153.440	93,25	93,25

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Jumlah personil/ aparat yang belum memadai sehingga pencapaian Program Kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
- ❖ Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian Program Kerja.
- ❖ Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.



BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah meliputi :

- a) Laporan realisasi anggaran Bappenda Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b) Neraca Bappenda Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Bappenda Kabupaten Tegal adalah basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Bappenda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



- c) Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d) Bappenda Kabupaten Tegal dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 menggunakan basis kas dan akrual, maka dalam catatan atas laporan keuangan ini perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis Kas dan akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya yang dilaporkan dalam bentuk Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional LO dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.



5. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/TGR. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.

6. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

7. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

8. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20%.

Dan jika kepemilikannya 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan,

9. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berjalan.



- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan/atau pengurangan.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
- e. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
- f. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
- g. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau pengurangan.
- i. Dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca SKPD Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 belum dikurangkan dengan Akumulasi Penyusunan masing-masing pos aset.

10. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biayapembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

11. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan



seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

12. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

13. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

14. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

15. Kontruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset



tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

16. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan lainnya.

17. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

18. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

19. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

a. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditansfer dalam periode berjalan.

20. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

21. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila



diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

22. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

23. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat adanya hak atas pendapatan melalui surat ketetapan pajak dan pendapatan yang direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah maupun yang belum atas pembayaran secara tunai.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan Lo diakui sesuai periode tahun berjalan sedangkan Pendapatan Lo dengan masa pajak tertentu di kelompokkan dengan Pendapatan diterima dimuka.

24. Beban

Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dalam satu periode tahun berjalan.



Beban diakui pada saat terjadinya peristiwa atau secara akrual, beban dapat berupa keluarnya pengeluaran ekonomi atau dapat juga penurunan manfaat dan resiko.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Bappenda mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

**BAB. V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN(LRA)**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN-LRA	125.228.000.000	125.712.144.290	100,39	124.022.483.342
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	125.228.000.000	125.712.144.290	100,39	124.022.483.342
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	125.228.000.000	125.236.006.697	100,01	122.808.450.157
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	-	476.137.593	0,00	1.214.033.185
5	BELANJA	16.627.462.000	13.615.437.775	81,89	14.371.015.788
5.1	BELANJA OPERASI	14.371.149.000	12.095.704.817	84,17	13.480.350.788
5.1.1	Belanja Pegawai	10.610.357.000	8.532.879.930	80,42	9.233.802.506
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.760.792.000	3.562.824.887	94,74	4.246.548.282
5.2	BELANJA MODAL	2.256.313.000	1.519.732.958	67,35	890.665.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.246.313.000	1.509.732.958	67,21	380.755.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	100,00	505.410.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		4.500.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	108.600.538.000	112.096.706.515	103,22	109.651.467.554
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	108.600.538.000	112.096.706.515	103,22	109.651.467.554

A) PENDAPATAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal mengelola Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Realisasi Pendapatan dalam Tahun 2020 sebesar Rp125.712.144.290,- atau 100,39% dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Akun	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	125.228.000.000	125.236.006.697	100,01	122.808.450.157
2	Lain-lain PAD yang sah	-	476.137.593	-	1.214.033.185
	JUMLAH	125.228.000.000	125.712.144.290	100,39	124.022.483.342

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp124.022.483.342, 00 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp125.712.144.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.683.481.232,00 atau 1,34%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp125.712.144.290,00 atau 100,39% dari anggaran sebesar Rp125.228.000.000,00 naik sebesar Rp 1.689.660.948,00 dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp 124.022.483.342,00 dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

NO	AKUN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	Pajak Hotel	550.000.000	422.893.771	76,89	603.842.624
	- Hotel Bintang Tiga	74.286.000	-	0,00	-
	- Hotel Bintang Dua	138.571.000	9.194.141	6,63	13.800.000
	- Hotel Bintang Satu	162.857.000	267.364.149	164,17	472.635.853
	- Hotel Melati Satu	174.286.000	146.335.481	83,96	117.406.771
2	Pajak Restoran	4.800.000.000	4.665.435.647	97,20	6.792.691.413
	- Restoran	1.472.001.000	360.484.507	24,49	631.895.450
	- Rumah Makan	348.266.000	1.372.518.251	394,10	1.464.803.723
	- Katering	2.979.733.000	2.932.432.889	98,41	4.695.992.240
3	Pajak Hiburan	225.000.000	200.361.654	89,05	522.518.511
	- Karaoke	22.000.000	3.900.000	17,73	5.625.000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	AKUN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
	- Sirkus/Akrobat/Sulap	650.000	500.000	76,92	300.000
	- Permainan Biliar	1.100.000	-	0,00	-
	- Balap Kendaraan Bermotor	7.000.000	-	0,00	1.500.000
	- Permainan Ketangkasan	176.250.000	195.361.654	110,84	512.393.411
	- Panti Pijat/Refleksi	7.000.000	600.000	8,57	1.000.000
	- Pajak Hiburan/ Pertandingan Olah Raga	11.000.000	-	-	1.700.100
4	Pajak Reklame	2.000.000.000	2.328.737.989	116,44	2.537.367.643
	- Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.402.898.000	1.937.875.219	138,13	2.231.714.457
	- Reklame Kain	378.000.000	242.116.320	64,05	210.856.617
	- Reklame Melekat/Stiker	8.000.000	80.368.875	1004,61	31.775.625
	- Reklame Selebaran	1.102.000	-	0,00	-
	- Reklame Berjalan	210.000.000	68.377.575	32,56	63.020.944
5	Pajak Penerangan Jalan	51.300.000.000	49.109.153.663	95,73	50.609.467.174
	- PPJ dihasilkan sendiri	51.300.000.000	49.109.153.663	95,73	50.609.467.174
6	Pajak Parkir	100.000.000	134.945.940	134,95	72.540.250
7	Pajak Air Tanah	350.000.000	425.829.080	121,67	404.626.840
8	Pajak Sarang Burung	3.000.000	3.100.000	103,33	3.200.000
9	Pajak Mineral bukan Logam	400.000.000	407.706.014	101,93	712.254.574
	- Batu kapur	214.000.000	76.454.150	35,73	381.590.374
	- Batu Blonos	9.900.000	129.565.500	1308,74	127.334.700
	- Pasir Pasang	1.100.000	36.495.000	3317,73	35.070.000
	- Tanah Urug	175.000.000	165.191.364	94,40	168.259.500
10	Pajak PBB-P2	42.000.000.000	41.652.241.293	99,17	35.411.948.381
11	BPHTB	23.500.000.000	25.885.601.646	110,15	25.137.992.747
	Jumlah Pajak Daerah	125.228.000.000	125.236.006.697		122.808.450.157
12	Lain-Lain PAD Yg Sah	-	476.137.593	0,00	1.214.033.185
	JUMLAH	125.228.000.000	125.712.144.290	100,39	124.022.483.342

Prosentase yang sangat signifikan ada pada pajak hotel bintang satu sebesar 164,17% pajak rumah makan sebesar 394,10% pajak permainan ketangkasan sebesar 110,84% pajak reklame melekat/stiker sebesar 1.004,61% pajak batu blonos sebesar 1,308,74% dari batu granit, pajak pasir pasang sebesar 3.317,73%.

a.2) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp476.137.593,- dengan anggarannya sebesar Rp. 0,00. Realisasi

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

menurun sebesar Rp737.895.592,- atau 11,45% dari Tahun 2019.

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

No	Akun	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	-	-
2	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.099.926	10.539.751
3	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan batuan	7.772.802	25.979.244
4	Pendapatan Denda Pajak PBB- P2	451.940.101	1.155.765.555
5	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	2.750.000	-
6	Pendapatan Denda Pajak Restoran	3.576.129	13.214.412
7	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	149.244	540.517
8	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.116.706	1.488.214
9	Pendapatan Denda Pajak Parkir	464.060	1.254.520
10	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.268.625	5.196.972
11	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	-	54.000
	JUMLAH	476.137.593	1.214.033.185

Pendapatan denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak sarang burung wallet merupakan pendapatan keterlambatan pembayaran pajak yang melebihi tanggal jatuh tempo.

Pengenaan denda tersebut mulai diberlakukan tahun 2020 sebesar 2% dari nilai pajak.

B). BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah yaitu:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Daerah :	TA 2020		%	TA 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
a. Belanja Operasi	14.371.149.000	12.095.704.817	84,17	13.480.350.788
b. Belanja Modal	2.256.313.000	1.519.732.958	67,35	890.665.000
Jumlah	16.627.462.000	13.615.437.775	81,89	14.371.015.788

(LRA SIMDA tahun 2020)

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.615.437.775,- atau 81,89% dari anggarannya sebesar Rp16.627.462.000,- dengan rincian : Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp14.371.149.000,- dengan realisasi sebesar Rp12.095.704.817,- atau 84,17% dan Anggaran belanja Modal sebesar Rp2.256.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.519.732.958,- atau 67,35% dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	14.371.149.000	12.095.704.817	84,17	13.480.350.788
	Belanja Pegawai	10.610.357.000	8.532.879.930	80,42	9.233.802.506
	Belanja Barang dan Jasa	3.760.792.000	3.562.824.887	94,74	4.246.548.282
2	Belanja Modal	2.256.313.000	1.519.732.958	67,35	890.665.000
	Belanja Peralatan dan Mesin	2.246.313.000	1.509.732.958	67,21	380.755.000
	Belanja Gedung dan bangunan	10.000.000	10.000.000	100,00	505.410.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		4.500.000
	Jumlah	16.627.462.000	13.615.437.775	81,89	14.371.015.788

(LRA SIMDA tahun 2020)

b.1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.532.978.930,- atau 80,42% dari anggaran sebesar Rp10.610.357.000,- yang terdiri dari :

No	Akun	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Gaji & tunjangan	3.312.476.000	3.101.639.161	93,64	3.109.531.527

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	Insentif pemungutan pajak daerah	6.261.400.000	4.499.289.869	71,86	3.237.345.887
3	Uang lembur PNS/non PNS	55.921.000	54.875.500	98,13	158.652.000
4	Honorarium PNS	506.828.000	465.577.500	91,86	619.424.600
5	Honorarium Non PNS	473.732.000	411.497.900	86,86	516.460.000
	Jumlah	10.610.357.000	8.532.879.930	80,42	7.641.414.014

*(SPJ-Belanja-Fungsional tahun 2020)***b.2) Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.562.824.887,- atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp3.760.792.000,- meningkat sebesar Rp197.976.113,- dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp4.246.548.282,-

Rincian Belanja barang dan jasa terdiri dari :

No	Akun	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	204.454.750
2	Belanja alat listrik dan elektronik	23.694.000
3	Belanja perangko, meterai dan benda pos	6.049.000
4	Belanja peralatan kebersihan & pembersih	17.058.150
5	Belanja perlengkapan computer dan printer	171.187.500
7	Belanja bahan/material lainnya	31.515.000
8	Belanja Peralatan kantor/rumah tangga	15.521.000
9	Belanja Telepon	1.541.109
10	Belanja Air	846.500
11	Belanja Listrik	100.800.000
12	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.050.000
13	Belanja kawat/facsimile/internet	117.066.970
14	Belanja jasa kantor lainnya	845.633.000
15	Belanja jasa service	36.990.451
16	Belanja Penggantian suku cadang	36.894.724
17	Belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas	89.986.076
18	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.676.850
19	Belanja cetak	506.499.150
20	Belanja penggandaan	33.554.000
21	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.160.000
24	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya	5.500.000
25	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	38.017.000
26	Belanja makanan dan minuman rapat	52.550.000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

27	Belanja makanan dan minuman Tamu	6.095.000
28	Belanja makanan dan minuman Pelatihan	31.250.000
29	Belanja Makanan dan Minuman Lainnya	3.600.000
30	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	344.270.000
31	Belanja perjalanan Luar Dalam Daerah	114.461.667
32	Belanja pemeliharaan Peralatan dan mesin	58.078.990
33	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	108.000.000
34	Belanja jasa konsultasi perencanaan	139.040.000
35	Belanja jasa konsultasi lainnya	284.779.000
36	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.405.000
37	Belanja uang utk diberikan kepada masyarakat	64.700.000
38	Belanja jasa Narasumber/tenaga ahli	34.900.000
	JUMLAH	3.562.824.887

(saldo buku besar barang/jasa)

b.3) Belanja Modal

Realisasi belanja Modal TA 2020 sebesar Rp1.519.732.958,- atau 67,35% dari anggaran sebesar Rp2.256.313.000,- meningkat sebesar Rp629.067.958,- Rincian realisasi belanja modal terdiri dari :

No	Akun	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja modal peralatan dan mesin	2.246.313.000	1.509.732.958	67,21	380.755.000
2	Belanja modal gedung dan bangunan	10.000.000	10.000.000	100,00	505.410.000
3	Belanja modal asset tetap lainnya	-	-		4.500.000
	Jumlah	2.256.313.000	1.519.732.958	67,35	890.665.000

(LRA SIMDA tahun 2020)

Rincian Belanja Modal Peralatan dan mesin :

No	Akun	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	384.010.000
2	Pengadaan Alat Ukur Lainnya (alat ukur penentu letak koordinat obyek pajak)	150.710.000

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	Pengadaan alat penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari, Arsip, Troli dan Tangga Lipat)	24.915.000
4	Pengadaan Alat kantor lainnya	500.612.500
5	Pengadaan Muebelair ruang pelayanan	114.819.500
6	Pengadaan Alat pendingin	61.950.000
7	Pengadaan Personal Komputer	224.935.000
8	Pengadaan Peralatan personal komputer	40.677.000
9	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.103.958
	JUMLAH	1.509.732.958

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

No	Akun	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Redesign RAB)	10.000.000
	JUMLAH	10.000.000

b.4) Surplus (Defisit)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah yang terdapat pada APBD Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2020. Pada realisasi anggaran yang dilaksanakan Bappenda terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp112.096.706.515,- lebih besar dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp108.600.538.000,-

c). PEMBIAYAAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tidak memiliki pembiayaan.

5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN ATAS POS NERACA**A.ASET**

Jumlah Aset Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal sebesar **Rp33.597.147.189,73,-** terdiri dari aset lancar sebesar **Rp29.968.621.627,77** dan aset tetap sebesar **Rp3.619.525.516,96** serta aset tetap lainnya sebesar **Rp9.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

a.1) Aset Lancar

Berdasarkan saldo pada Neraca per 31 Desember 2020, jumlah aset lancar sebesar **Rp29.968.621.672,77,-** terdiri dari :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Kas di Bendahara Penerimaan : Rp. 6.179.716,00
2. Piutang Pendapatan : Rp. 91.985.859.620,00
3. Penyisihan Piutang : Rp. (62.130.665.163,22)
4. Persediaan : Rp. 107.247.500,00

Penjelasan :**(1) Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara di Penerimaan sampai dengan akhir Desember 2020 Rp 6.179.716,00,- akun ini menggambarkan kas yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020. Pada tahun 2020 Kas di Bendahara Penerimaan bertambah sebesar Rp 6.179.716,00 berasal dari selisih penerimaan antara kas di penampungan dan Kas di Daerah.

(2) Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar Rp 91.985.859.620,00,- akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang berasal dari pajak asli daerah. Piutang pendapatan terdiri dari :

REK	URAIAN	JUMLAH 2020	JUMLAH 2019
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah	66.981.158.678,00	60.090.301.416,00
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang sah	25.004.700.942,00	22.364.970.660,00
	JUMLAH	91.985.859.620,00	82.455.272.076,00

❖ PIUTANG PAJAK DAERAH

Piutang pajak berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2020 dan sisa piutang tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp66.981.158.678,00 dan saldo per 31 Desember 2019 Rp60.090.301.416,00 dengan rincian piutang pajak sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Hiburan	608.675,00	608.675,00
2	Piutang Pajak Reklame	24.767.850,00	24.308.374,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.906.050.823,00	4.507.700.366,00
4	Piutang Pajak Air Tanah	56.660.210,00	38.097.090,00
5	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.924.000,00	21.924.000,00
6	Piutang PBB	62.971.147.120,00	55.497.662.911,00
	Jumlah	66.981.158.678,00	60.090.301.416,00

Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

➤ **Piutang Pajak Hiburan**

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	608.675	>5 tahun	100,00	608.675,00	0,00
Jumlah	608.675			608.675,00	0,00

➤ **Piutang Pajak Reklame**

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2020	21.122.850	<1 tahun	0,50	105.614,25	21.017.235,75
2019	-	1-2 tahun	10,00	-	-
2018	-	2-5 tahun	50,00	-	-
2017	3.645.000	2-5 tahun	50,00	1.822.500,00	1.822.500,00
Jumlah	24.767.850			1.928.114,25	22.839.735,75

Pajak reklame tahun 2018 tidak ada piutang dikarenakan sudah terealisasi bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp128.352.613,00

➤ **Piutang Pajak Penerangan Jalan**

Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 sebesar Rp3.906.050.823,00 adalah Penerimaan PPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal masa pajak

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

bulan Desember 2020 yang belum terbayar/belum disetorkan ke Kas pemerintah Kabupaten Tegal. Penerimaan PPJ bulan Desember yang menimbulkan piutang atas dasar pemeriksaan LKPJ Bupati oleh BPK.

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2020	3.906.050.823	<1 tahun	0,50	19.530.254,12	3.886.520.568,89
Jumlah	3.906.050.823			19.530.254,12	3.886.520.568,89

➤ Piutang Pajak Air Tanah

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2020	32.494.020	<1 tahun	0,50	162.470,10	32.331.549,90
2019	265.500	1-2 tahun	10,00	26.550,00	238.950,00
2018	4.017.300	2-5 tahun	50,00	2.008.650,00	2.008.650,00
2017	11.186.490	2-5 tahun	50,00	5.593.245,00	5.593.245,00
2016	4.263.000	2-5 tahun	50,00	2.131.500,00	2.131.500,00
2015	3.189.000	>5 tahun	100,00	3.189.000,00	-
2014	1.244.900	>5 tahun	100,00	1.244.900,00	-
Jumlah	56.660.210			14.356.315,10	42.303.894,90

➤ Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	21.924.000	>5 tahun	100,00	21.924.000,00	-
Jumlah	21.924.000			21.924.000,00	-

➤ Piutang PBB

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tahun	Saldo Piutang 2020 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang 2019 (Net Realizable Value) (Rp)
2020	9.442.456.208	<1 tahun	0,50	47.212.281,04	9.395.243.926,96
2019	6.347.449.346	1-2 tahun	10,00	634.744.934,60	5.712.704.411,40
2018	4.759.089.222	2-5 tahun	50,00	2.379.544.611,00	2.379.544.611,00
2017	4.332.049.326	2-5 tahun	50,00	2.166.024.663,00	2.166.024.663,00
2016	2.571.931.239	2-5 tahun	50,00	1.285.965.619,50	1.285.965.619,50
2015	2.622.812.683	>5 tahun	100,00	2.622.812.683,00	-
2014	3.371.523.398	>5 tahun	100,00	3.371.523.398,00	-
2013	4.435.464.998	>5 tahun	100,00	4.435.464.998,00	-
2012	2.386.869.852	>5 tahun	100,00	2.386.869.852,00	-
2011	2.158.638.785	>5 tahun	100,00	2.158.638.785,00	-
2010	3.076.335.941	>5 tahun	100,00	3.076.335.941,00	-
2009	3.492.823.582	>5 tahun	100,00	3.492.823.582,00	-
2008	2.490.034.233	>5 tahun	100,00	2.490.034.233,00	-
2007	2.616.085.537	>5 tahun	100,00	2.616.085.537,00	-
2006	1.988.766.577	>5 tahun	100,00	1.988.766.577,00	-
2005	1.664.904.014	>5 tahun	100,00	1.664.904.014,00	-
2004	1.501.645.915	>5 tahun	100,00	1.501.645.915,00	-
2003	1.338.948.248	>5 tahun	100,00	1.338.948.248,00	-
2002	684.978.682	>5 tahun	100,00	684.978.682,00	-
	1.688.339.334	>5 tahun	100,00	1.688.339.334,00	-
Jumlah	62.971.147.120			42.031.663.888,14	20.939.483.232

❖ PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Piutang lain-lain PAD yang sah terdiri dari sebesar Rp25.004.700.942,48 terdiri dari :

No	Akun	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Piutang Denda PBB-P2	25.003.184.985,48	22.358.593.947

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	Piutang Denda Pajak Reklame	1.515.957,00	
3	Piutang Denda Pajak Air Tanah		4.377.737
	JUMLAH	25.004.700.942,48	22.364.970.660

Piutang Denda PBB-P2 sebesar Rp25.003.184.985,48 bertambah dari piutang 2019 sebesar Rp22.358.593.947,00 dan Piutang Denda Reklame Tahun 2020 sebesar Rp. 1.515.957,00 bertambah dari sebelumnya 0,00 Piutang Denda Pajak Air Tanah Tahun 2020 sebesar 0,00 berkurang dari Tahun 2019 sebesar Rp4.377.737,00.

(3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang sebesar Rp(62.130.665.163,23) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(42.090.011.246,61) dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp(20.040.653.916,62) rincian sbb :

➤ Penyisihan Piutang Pajak

No	Klasifikasi Umur	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	< 1 Tahun (0,5%)	67.010.619,51	61.655.640,80
2	1 - 2 Tahun (10%)	634.771.484,60	562.059.169,00
3	2 - 5 Tahun (50%)	5.843.090.788,50	5.228.526.437,00
4	> 5 Tahun (100%)	35.545.138.354,00	31.681.528.693,00
	JUMLAH	42.090.011.246,61	37.533.769.939,80

➤ Penyisihan Piutang lain- lain PAD yang sah

No	Klasifikasi Umur	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	< 1 Tahun (0,5%)	2.261.883,44	2.348.886,22
2	1 - 2 Tahun (10%)	190.532.830,38	168.371.246,00
3	2 - 5 Tahun (50%)	2.799.136.748,88	2.502.197.591,76
4	> 5 Tahun (100%)	17.048.722.453,92	15.207.133.772,64
	JUMLAH	20.040.653.916,62	17.880.051.496,62

(4) Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jumlah saldo persediaan Bappenda Kabupaten Tegal



berdasarkan inventarisasi fisik pada 31 Desember 2020 sebesar Rp107.247.500,00 yang terdiri dari Persediaan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp26.388.000,00 dan persediaan Cetak sebesar Rp80.859.500,00

a.2) Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada di bawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Tegal melalui pembelian, pembangunan, pertukaran dengan aset lainnya.

Berikut aset tetap yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah per tanggal 31 desember 2020 sebesar Rp3.619.525.516,96 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	a. Tanah	0,00	0,00	-	0,00
2	b. Peralatan dan mesin	4.603.064.272,96	1.509.732.958,00	-	6.112.797.230,96
3	c. Gedung dan Bangunan	2.089.770.400,00	0,00	-	2.089.770.400,00
4	d. Jalan,Irigasi dan jaringan	0,00	0,00	-	0,00
5	e. Aset tetap lainnya	0,00	0,00	-	0,00
6	f. Konstruksi dlm pengperjaan	70.940.000,00	0,00	-	70.940.000,00
7	g. Akumulasi Penyusutan	-4.037.631.641,00	0,00	-	- 4.653.982.114,00
	Jumlah aset tetap	2.726.143.031,96	1.509.732.958,00	-	3.619.525.516,96

Penjelasan dari jenis aset tetap sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah kantor tidak disusutkan, dasar penilaian tanah tidak menggunakan harga taksiran yaitu harga disekitar letak tanah tersebut. Luas tanah sebesar ± 5.920 m²

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.112.797.230,96 ada penambahan sebesar Rp1.675.842.958,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Tambah	Kurang
1	Alat -alat bantu	156.070.000,00	156.070.000,00	-	-
2	Alat angkutan darat bermotor	1.768.722.438,00	1.384.712.438,00	384.010.000,00	-
3	Alat bengkel tak bermesin	11.930.000,00	11.930.000,00	-	-
4	Alat Ukur	31.030.000,00	31.030.000,00	150.710.000,00	(150.710.000)
5	Alat kantor	1.083.880.196,00	467.322.705,00	616.557.491,00	-
6	Alat Rumah Tangga	861.767.694,00	684.998.194,00	176.769.500,00	-
7	Komputer	1.876.730.721,00	1.580.200.162,00	311.930.559,00	(15.400.000)
8	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	60.542.510,00	60.542.510,00	-	-
9	Alat Studio	194.743.263,96	194.743.263,96	-	-
10	Alat Komunikasi	67.380.408,00	31.515.000,00	35.865.408,00	-
11	Alat keamanan dan perlindungan	-	-	-	-
	Jumlah	6.112.797.230,96	4.603.064.272,96	1.675.842.958,00	(166.110.000,00)

(saldo buku besar aset.1.3.2.74)

Penjelasan tambah / kurang kelompok peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- ❖ Alat Angkuran Darat Bermotor **bertambah** sebesar Rp384.010.000,00 terdiri :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional: Rp 384.010.000,00
- ❖ Alat Ukur **bertambah** sebesar Rp 150.710.000,00 terdiri dari:
 - Pengadaan alat kantor lainnya (drone) : Rp 91.029.991,00
 - Pengadaan alat komunikasi (tablet) : Rp 28.761.450,00
 - Pengadaan Personal Komputer : Rp 21.571.088,00
 - Pengadaan Laptop : Rp 9.347.471,00
- Alat Ukur **berkurang** sebesar Rp 150.710.000,00 terdiri dari:
 - Reklas alat kantor lainnya (drone) : (Rp 91.029.991,00)
 - Reklas alat komunikasi (tablet) : (Rp 28.761.450,00)
 - Reklas Personal Komputer : (Rp 21.571.088,00)
 - Reklas Laptop : (Rp 9.347.471,00)



- ❖ Alat kantor **bertambah** sebesar Rp616.517.491,00 terdiri :
 - Pengadaan troli barang : Rp 825.000,00
 - Pengadaan tangga lipat : Rp 4.290.000,00
 - Pengadaan CCTV : Rp 27.687.830,00
 - Pengadaan Mesin Antrian : Rp 35.249.237,00
 - Pengadaan space iklan 4 m x 2,5 m : Rp 84.475.000,00
 - Pengadaan Papan Baliho besar : Rp 125.370.232,00
 - Pengadaan Mesin Porporasi manual : Rp 67.369.768,00
 - Pengadaan Mesin Survey Kepuasan Pelanggan : Rp 35.805.963,00
 - Reklas alat kantor lainnya (drone) : Rp 91.029.991,00

- ❖ Alat Rumah Tangga **bertambah** sebesar Rp176.769.500,00 terdiri :
 - Pengadaan pakat meja pelayanan : Rp 114.819.500,00
 - Pengadaan AC standing floor : Rp 26.144.037,00
 - Pengadaan AC standing dan AC split : Rp 35.805.96300

- ❖ Komputer **bertambah** sebesar Rp296.530.559,00 terdiri :

Komputer unit **bertambah** sebesar Rp.271.253.559,00 terdiri dari

 - Pengadaan PC All in One : Rp 175.710.000,00
 - Reklas laptop (dari peralatan komp) : Rp 15.400.000,00
 - Pengadaan laptop : Rp 49.225.000,00
 - Reklas PC All in one : Rp 21.571.088,00
 - Reklas laptop : Rp 9.347.471,00

Peralatan Komputer **bertambah** sebesar Rp 40.677.00,00 terdiri:

 - Pengadaan Laptop : Rp 15.400.000,00
 - Pengadaan printer : Rp 4.300.000,00
 - Pengadaan printer inkjet : Rp 12.672.000,00
 - Pengadaan printer multifunction : Rp 8.305.000,00

Perlatan Komputer **berkurang** sebesar Rp 15.400.000,00 terdiri dari:

 - Reklas pembelian laptop : (Rp 15.400.000,00)

- ❖ Alat Komunikasi **bertambah** sebesar Rp35.865.408,00 terdiri :
 - Pengadaan alat komunikasi (HP) : Rp 7.103.958,00



➤ Reklas alat komunikasi (tablet) : Rp 28.761.450,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.089.770.400,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.089.770.400,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0, untuk irigasi saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0, untuk irigasi saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.70.940.000,- untuk irigasi saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.70.940.000,-

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp(4.037.631.641,00) dan saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp(4.653.982.114,00) ada penambahan sebesar Rp(616.350.473,00)

B. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan kewajiban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan. Kewajiban Bappenda tahun 2020 sebesar **Rp1.356.329.390,00**. Kewajiban ada 2 (dua) macam yaitu :

- (1) Kewajiban Jangka Pendek
- (2) Kewajiban Jangka Panjang

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Bappenda yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2020. Kewajiban Jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.356.329.390,00 yang

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

meliputi pendapatan diterima dimuka sebesar Rp952.496.535,00 dan Utang Beban sebesar Rp403.832.855,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo akun pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp952.496.535,00 yaitu pendapatan dari reklame masa pajak tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PAJAK	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	KETERANGAN
1	Reklame dengan konstruksi tiang	739.627.357,00	Reklame Papan/Billboard/Vidiotron/Megatron
2	Reklame dengan konstruksi sederhana	148.023.731,00	Reklame Papan/Billboard/Vidiotron/Megatron
3	Reklame spanduk/ kain	10.572.528,00	Reklame Kain/ Banner
4	Reklame umbul-umbul	439.200,00	Reklame Kain
5	Reklame banner	555.188,00	Reklame Kain
6	Reklame kendaraan	50.947.249,00	Reklame Berjalan
7	Reklame Stiker/Poster	2.331.282,00	Reklame
	JUMLAH	952.496.535,00	

1.2. Utang Beban

Saldo akun Utang Beban per 31 Desember 2020 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.403.832.855,00 berkurang sebesar Rp.284.061.185,00 dari saldo Utang Beban Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.687.894.040,00.

Utang Beban 2020 terdiri dari tagihan bulanan rutin bulan Desember sebesar Rp 23.902.855,00 dan utang beban Insentif Pajak Daerah triwulan IV sebesar Rp379.930.000,00 Adapun rincian sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Utang Beban Tahun 2020 dari tagihan bulanan :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Tagihan Biaya Internet Desember 2020.	10.098.000
2	Tagihan Biaya Listrik Desember 2020 dan Kekurangan Bulan November 2020.	13.585.813
3	Tagihan Biaya Telepon Desember 2020.	146.042
4	Tagihan PDAM Desember 2020.	73.000
	JUMLAH	23.902.855

Perbandingan Utang Beban Tahun 2019 :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Tagihan Biaya Internet Desember 2019.	9.064.000
2	Tagihan Biaya Listrik Desember 2019.	9.185.848
3	Tagihan Biaya Telepon Desember 2019.	136.823
4	Tagihan PDAM Desember 2019.	74.500
	JUMLAH	18.461.171

Utang Beban Insentif triwulan IV Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Insentif Pajak BPHTB (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda)	70.000.000
2	Insentif Pajak BPHTB (Bappenda)	184.800.000
4	Insentif Pajak BPHTB (PPAT / PPATs)	25.200.000
5	Insentif Pajak Reklame (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda)	5.000.000
6	Insentif Pajak Reklame (Bappenda)	15.000.000
7	Insentif Pajak Minerba (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda)	1.000.000
8	Insentif Pajak Minerba (Bappenda)	3.000.000
9	Insentif Pajak Parkir (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda)	250.000
10	Insentif Pajak Parkir (Bappenda)	750.000
11	Insentif Pajak Sarang Burung Walet (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda)	7.500
12	Insentif Pajak Sarang Burung Walet (Bappenda)	22.500

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

15	Insentif Pajak Hotel (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Tw. III Tahun Anggaran 2020 yang diterima Tahun Anggaran 2021)	1.925.000
16	Insentif Pajak Hotel (Bappenda Tw. III Tahun Anggaran 2020 yang diterima Tahun Anggaran 2021)	5.775.000
17	Insentif Pajak Restoran (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Tw. III Tahun Anggaran 2020 yang diterima Tahun Anggaran 2021)	16.800.000
18	Insentif Pajak Restoran (Bappenda Tw. III Tahun Anggaran 2020 yang diterima Tahun Anggaran 2021)	50.400.000
Jumlah		379.930.000

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada Utang Jangka Panjang Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

C. EKUITAS DANA

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.

- Jumlah Aset sebesar : Rp 33.597.147.189,73
- Jumlah Kewajiban : Rp 1.356.329.390,00
- Jumlah Ekuitas Dana sebesar : Rp 32.240.817.799,73
- Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 33.597.147.189,73

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN ATAS POS PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) adalah Laporan pendapatan dan beban secara keseluruhan baik yang menambah atau mengurangi dalam bentuk kas masuk/keluar atau dalam bentuk nilai ekonomi/aset yang bertambah atau berkurang dalam periode berjalan akuntansi dan dicatat saat terjadi pengakuan hak.

Laporan Operasional dalam SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal merupakan laporan yang baru dijalankan tahun 2020 sesuai dengan system akuntansi berbasis *accrual* yang diterapkan.

Laporan LO Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dalam menjalankan fungsinya sebagai SKPD mencakup Pos Pendapatan dan Beban LO khusus SKPD dimana pos pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan beban mencakup keseluruhan dalam lingkup SKPD dengan saldo per 31

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Desember 2020 selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban sebesar **Rp121.878.547.744,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan – LO	132.178.984.005,00	127.842.053.806,00	4.336.930.199,00
2	Beban – LO	16.030.347.140,17	17.993.205.778,23	-1.962.858.638,06
	SURPLUS /DEFISIT DARI LO	116.148.636.864,83	109.848.848.027,77	2.374.071.560,94

Rincian Per Pos Laporan LO :

1. PENDAPATAN - LO

Saldo Pendapatan LO per 31 Desember 2020 yaitu dalam Pos Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp132.171.994.271,00 Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp6.989.734,00

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 meliputi Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp132.171.994.271,00 dan Lain-lain PAD yang Sah – LO sebesar Rp15.814.251,00 dengan rincian sebagai berikut :

❖ Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp132.156.180.020,00:

NO	JENIS PAJAK	NILAI (Rp.)
1	Pajak Hotel – LO	422.893.771
2	Pajak Restoran – LO	360.484.507
3	Pajak Rumah Makan – LO	1.372.518.251
4	Jasa Boga/Katering – LO	2.932.432.889
5	Diskotik, Karaoke, Klub Malam - LO	3.900.000
6	Sirkus/Akrobat/Sulap – LO	500.000
7	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	195.361.654
8	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat kebugaran (fitnes center) -LO	600.000
9	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	2.007.773.162
10	Pajak Reklame Kain – LO	255.272.445
11	Pajak Reklame Melekat/Stiker – LO	78.037.593
12	Pajak Reklame Berjalan – LO	17.430.326
13	Pajak Penerangan Jalan – LO	48.507.504.120
14	Pajak Parkir – LO	134.945.940
15	Pajak Air Tanah – LO	444.392.200

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

16	Pajak Sarang Burung Walet – LO	3.100.000
17	Batu Kapur	76.454.150
18	Batu Blonos – LO	129.565.500
19	Pasir Pasang – LO	201.686.364
20	Pajak Bumi dan Bangunan P2 - LO	49.125.725.502
21	Pajak BPHTB – Pemindahan Hak - LO	25.885.601.646
	JUMLAH	132.156.180.020

(saldo buku besar pendapatan pajak daerah-LO)

❖ Lain-lain PAD yang Sah – LO

Saldo lain-lain PAD yang Sah LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.814.251,00 yang terdiri dari :

NO	JENIS PENDAPATAN	JUMLAH
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	1.099.926
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	3.576.129
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	149.244
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	464.060
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	2.090
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	7.772.802
7	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LO	2.750.000
	JUMLAH	15.814.251,00

(saldo buku besar lain2 PAD yg sah-LO)

a. Pendapatan Transfer – LO

Saldo Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2020 NIHIL

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.989.734,00.

2. BEBAN

Saldo Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.030.347.140,17 meliputi :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	JUMLAH
1	Beban Pegawai – LO	8.243.377.061,00
2	Beban Barang dan Jasa	3.737.397.205,00
3	Beban Hibah	9.405.000,00
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	616.350.475,00
5	Beban Penyisihan Piutang	3.423.817.399,17
	JUMLAH	16.030.347.140,17

❖ **Beban Pegawai – LO**

Beban Pegawai - LO adalah Beban Belanja tidak langsung dalam bentuk Gaji, Honor, Insentif, Tunjangan dalam membiayai operasional kegiatan Perangkat Daerah. Saldo Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.243.377.061 dengan rincian sebagai berikut :

NO	BEBAN PEGAWAI -LO	JUMLAH
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	3.101.639.161,00
2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.209.787.000,00
3	Beban Uang lembur -LO	54.875.500,00
4	Beban Honorarium PNS - LO	465.577.500,00
4	Beban Honorarium non PNS- LO	411.497.900,00
	JUMLAH	8.243.377.061,00

(saldo buku besar beban pegawai-LO)

❖ **Beban Barang dan Jasa - LO**

Beban Barang dan Jasa LO adalah seluruh pembelanjaan baik barang atau jasa yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam operasional kegiatan satu periode. Saldo Beban barang dan jasa LO per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.737.397.205,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	BEBAN BARANG DAN JASA -LO	JUMLAH
1	Beban Bahan Pakai Habis	421.371.134,00
2	Beban Persediaan Bahan/material	48.686.000,00
3	Beban Jasa Kantor	1.086.379.263,00
4	Beban Perawatan Kendaraan bermotor	172.548.101,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5	Beban Cetak dan Penggandaan	708.011.050,00
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Parkir	5.160.000,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00
8	Beban makanan dan minuman	131.512.000,00
9	Beban Perjalanan dinas	458.731.667,00
10	Beban Pemeliharaan	166.078.990,00
11	Beban Jasa Konsultasi	433.819.000,00
12	Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	64.700.000,00
13	Beban jasa narasumber/tenaga ahli	34.900.000,00
	JUMLAH	3.737.397.205,00

❖ **Beban Hibah**

Saldo Beban Hibah LO per 31 Desember 2020 adalah Rp 9.405.000,00

❖ **Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO**

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO adalah beban atas berkurangnya nilai ekonomis atas pemanfaatan asset tetap, dimana nilai asset tetap akan turun dan diakumulasikan sampai nilai asset adalah 0. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi LO per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	AKUN	PENYUSUTAN LO
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	575.089.221
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	41.261.254
	JUMLAH	616.350.475

❖ **Beban Penyisihan Piutang – LO**

Beban Penyisihan Piutang LO adalah cadangan resiko atas piutang yang tak tertagih dimana setiap tahun akan dihitung berdasarkan umur tunggakan piutang serta nilai pencadangannya dan dimasukkan kedalam beban penyisihan untuk kemudian akan menambah akumulasi penyisihan piutang. Saldo Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 Perhitungan Penyisihan Piutang yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Piutang Pajak Daerah.

**5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang menjelaskan tentang Perubahan Ekuitas awal dengan Ekuitas Akhir selama satu periode berjalan karena adanya surplus/defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Perubahan posisi Ekuitas pada Bappenda tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI	PENJELASAN
1	Ekuitas Awal	28.375.728.436,54	Ekuitas awal merupakan Saldo akhir Ekuitas TA 2019 yang kemudian menjadi Ekuitas Awal di Tahun 2019, dengan nilai saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.375.728.436,54
2	Surplus/Defisit-LO	116.148.636.864,83	Surplus/Defisit-LO merupakan saldo akhir dari Laporan LO yang akan dijumlahkan dengan ekuitas awal, dimana Laporan LO menunjukkan selisih Pendapatan Operasional dengan Beban Operasional Perangkat Daerah, nilai saldo Akhir Laporan LO Bappenda pada periode berjalan tahun 2019 adalah surplus sebesar Rp116.148.636.864,83
3	Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(193.020.702,64)	Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada koreksi piutang pajak sebesar Rp3.100.005.623,00 dan koreksi Penyisihan Piutang sebesar (Rp3.293.026.327,64) dan Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp2,00
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	(112.109.240.055,00)	
5	Ekuitas akhir	32.240.817.799,73	Penjumlahan Ekuitas awal dengan Pos Surplus/deficit LO dan pos Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Nilai Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas Akhir sebelum konsolidasi Bappenda adalah Surplus sebesar Rp32.240.817.799,73



BAB. VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD BAPPENDA

A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kabupaten Tegal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yaitu :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah lainnya;
- d. pengendalian pendapatan asli daerah;
- e. perencanaan dan pelaporan pendapatan daerah
- f. menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bappenda Kabupaten Tegal.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penunjang Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

**B. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - (2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan.
 2. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - (1) Sub Bidang Pendataan;
 - (2) Sub Bidang Penetapan;
 3. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bidang Penagihan;
 - (2) Sub Bidang Keberatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal memiliki struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tercatat sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 47 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 22 (dua puluh satu) pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Bappenda Kabupaten Tegal Berdasarkan Jabatan

No.	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG
1	II/b	1	1	0
2	III/a	1	1	0
3	III/b	3	3	0

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4	IV/a	7	8	0
JUMLAH		12	13	0

*) Data per Desember 2020

**Jumlah Pegawai & THL Bappenda Kabupaten Tegal
Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LK	PR
1	IV	6	5	1
2	III	30	17	13
3	II	11	11	0
4	I	-	-	-
5	THL	22	17	5
JUMLAH		69	51	20

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dengan jumlah 47 orang, 12 orang diantaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf non eselon 35 orang, dianggap kurang memadai terutama terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB P2 (Perdesaan dan Perkotaan) dan menjadi pajak daerah yang diberlakukan mulai tahun 2014 dan Pengalihan 6 (enam) jenis pajak lainnya pada tahun 2015.

Kebutuhan mendesak terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang ada adalah tenaga penyidik perpajakan dan juru sita yang sampai dengan saat ini belum terpenuhi.



BAB. VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk tahun 2020.

Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Slawi, 31 Desember 2020

KEPALA BAPPENDA

Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19640722 198503 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
